

## DAFTAR REFERENSI

### 1. BUKU

Chandra, S. *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah : Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan*. Jakarta: Grasindo, 2005.

Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Pertanahan : Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*. Cet. 1. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.

\_\_\_\_\_. *Hukum Pertanahan : Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*. Cet. 1. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2003.

Effendi, Bachtiar. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*. Cet. 1. Edisi Kedua. Bandung: Alumni, 1993.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Cet. 18. Jakarta: Djambatan, 2007.

\_\_\_\_\_. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Cet. 10. Jakarta: Djambatan, 2005.

\_\_\_\_\_. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2007.

Hutagalung, Arie S. "Perlindungan Pemilikan Tanah Dari Sengketa Menurut Hukum Tanah Nasional" Dalam *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005. Hlm. 397-398.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Jakarta: Alumni, 1991.

Parlindungan, A.P. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: CV. Mandar Maju, 1999.

Perangin-angin, Effendi. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Cet. 4. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Juni 1994.

- \_\_\_\_\_. *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah*. Cet. 2. Jakarta: CV. Rajawali, 1990.
- Pranjoto, Edi. *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional*. Jakarta: CV. Utomo, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 10. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2003.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cet. 10. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah*. Jakarta: Cipta Jaya, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wahid, Muchtar. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah : Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*. Cet. 1. Jakarta: Republika, 2008.
- Wijayanto, Agus. *Masalah dan Sengketa Hak Atas Tanah*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Badan Pertanahan Nasional, 2004).

## 2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB)* [Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)]. Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1985.
- Indonesia. *Undang-Undang Pokok Agraria*. UU No. 5. LN No. 104 Tahun 1960. TLN No. 2043.
- \_\_\_\_\_. *Pendaftaran Tanah*. PP No. 10 Tahun 1961. LN No. 28 Tahun 1961. TLN No. 2171.
- \_\_\_\_\_. *Pendaftaran Tanah*. PP No. 24 Tahun 1997. LN No. 59 Tahun 1997. TLN No. 3696.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. PP No. 37 Tahun 1998. LN No. 52 Tahun 1998. TLN No. 3746.

Badan Pertanahan Nasional. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. PMNA No. 3 Tahun 1997.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pelimpahan Kewenangan Untuk Pemberian Hak Atas Tanah dan Kewenangan Pembatalan Keputusan Mengenai Pemberian Hak Atas Tanah*. PMNA No. 3 Tahun 1999.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah*. PMNA No. 9 Tahun 1999.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006.

### **3. MAKALAH/ARTIKEL**

Abdurrahman. "Kedudukan Hukum Akta PPAT Sebagai Alat Bukti". *Media Notariat Edisi 4* (Februari 2008). Hlm. 91.

Basuki, Sunaryo. *Pokok-Pokok Hukum Tanah Nasional*, Diktat mata kuliah Hukum Agraria Bagian Pertama. September 2007. Magister Kenotariatan dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. September 2007.

### **4. INTERNET**

Sub Direktorat Penerangan dan Penyuluhan Direktorat Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. "Strategi Penanganan Sengketa Pertanahan", <http://bpn-jateng.net/index.php?action=news.detail&idnews=22&judul=PENANGANAN%20SENGKETA%20PERTANAHAN>. Diunduh tanggal 30 Agustus 2009.

### **5. WAWANCARA**

Widhiatso, Bintarwan. Kepala Sub Direktorat Perkara Wilayah II Direktorat Perkara Pertanahan Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Wawancara lisan. 12 Januari 2010.